**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Literatur Reviu**

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan empat buah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan fenomena utama dalam penelitian ini. Bentuk dari penelitian terdahulu berupa karya tulis, artikel dan jurnal yang peneliti kumpulkan dan dipilih dengan tujuan sebagai perbandingan dan acuan awal bagi penulis memahami fenomena utama dalam penelitian ini. Selain itu penulis menggunakan beberapa konsep dan metode yang ada dalam penelitian terdahulu untuk digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama disampaikan oleh Marwan Mohammed dari *Centre National de la Recherche Scientifique*, Paris. Penelitian yang berjudul *“Islamophobic Trends in Europe”* diterbitkan tahun 2014.[[1]](#footnote-2) Ia menyatakan kondisi islamophobia yang semakin meningkat di negara Eropa harus ditangani dengan berbagai cara, antara lain; melakukan catatan administrasi terhadap langkah yang diambil korban islamophobia, melakukan survey opini guna memetakan posisi muslim diberbagai wilayah, melakukan situasi terkait pembentukan data-data statistik dari adanya diskriminasi yang terjadi dalam ruang sosial tertentu, serta melakukan survey terhadap jumlah korban untuk mengukur tindak kejahatan dan melakukan penanganan langsung terhadap korban. Dengan melaksanakan mekanisme tersebut maka melalui data-data statistik yang terkumpul bisa dijadikan langkah awal sebagai refensi untuk menangani fenomena islamophobia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena peneliti hanya fokus pada sebuah negara dan bukan ruang lingkup internasional yang luas serta tidak menekankan pada mekanisme statistik sebagai unit analisis penelitian dalam mengurangi islamophobia di Eropa.

Kedua, sebuah karya tulis yang berjudul “Analisis Penyebab Munculnya Islamophobia di Jerman” oleh M.Ridha Farlanda yang terbit tahun 2016.[[2]](#footnote-3) Karya tulis tersebut memaparkan tentang sikap Jerman terhadap pengungsi yang datang. Sejak serangan bom di Paris, media berperan sangat besar dalam membangun islamophobia di negara-negara barat khususnya Jerman. Media menggambarkan muslim sebagai teroris, pembunuh, orang gila, kriminal, bahkan pemicu perang, hampir 80 persen media di Jerman memberitakan hal-hal negatif tentang Islam, seperti memuat gambar atau ilustrasi yang tidak simpatik terhadap Islam. Islamophobia yang kini terjadi di Jerman berkaitan erat dengan media dan gagalnya politik multikulturalisme. Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu adalah fokus utamanya terhadap permasalahan islamophobia yang dipengaruhi oleh media dan gagalnya politik multikulturalisme.

Ketiga, sebuah jurnal karya mahasiswa Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Andi Arie Setya Ningrum. Jurnal itu berjudul “Eksistensi Kelompok Pegida Serta Propaganda Anti-Pencari Suaka Dan Islamophobia Di Jerman”.[[3]](#footnote-4) Jurnal yang diterbitkan tahun 2016 ini mengenai sebuah kelompok patriotism di Jerman melawan islamisasi barat yang dinamakan Pegida. Pegida menyebarkan anti-pencari suaka dan propaganda islamophobia di Jerman. Eksistensi Pegida merupakan sikap kebencian faksi kanan masyarakat Jerman terhadap gelombang pengungsi dan pencari suaka dari Suriah bermayoritas islam yang masuk ke Jerman. Kekhawatiran akan mengancam keamanan dan memudarnya identitas budaya nasional (Yahudi-Kristen) karena pengungsi yang mayoritas islam dianggap akan melakukan islamisasi di Jerman ditengah maraknya sentimen islamophobia. Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian ini dan apa yang dilakukan peneliti terdahulu adalah sama-sama ingin mengkaji gerakan sayap kanan yang dinamakan Pegida dalam melawan islamisasi di Jerman. Yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini tidak memfokuskan pada hukum yang berlaku atas kebebasan berekspresi terhadap eksistensi gerakan Pegida di Jerman.

Keempat, sebuah jurnal dengan judul “Kebijakan Jerman terhadap Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015-2016” yang ditulis oleh Tasya Prima Avissa.[[4]](#footnote-5) Penelitian terdahulu menyatakan bahwa krisis pengungsi di Eropa bermula pada tahun 2014, berawal dari adanya peningkatan jumlah pengungsi yang ingin mencari perlindungan di negara-negara Eropa. Kebanyakan pengungsi datang dari negara-negara dengan kondisi perpolitikan yang tidak stabil dan bahkan sedang dilanda perang, seperti kawasan Timur Tengah. Ketidakstabilan kondisi politik di beberapa kawasan, khususnya pemberontakan di negara-negara Arab sejak tahun 2011 yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Jutaan orang berusaha melarikan diri dari konflik yang terjadi di negaranya. Perang Suriah menjadi kontributor terbesar gelombang pengungsi di Eropa. Ketika sebagian besar negara anggota Uni Eropa menyatakan ketidaksetujuannya akan kedatangan pengungsi di Eropa, namun Jerman justru mengeluarkan kebijakan pintu terbuka, yang mana kemudian menjadi kontroversi di antara negara anggota Uni Eropa. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek normatif di Jerman, seperti pentingnya nilai-nilai sejarah dan identitas yang mampu mempengaruhi tindakan Jerman terhadap pengungsi. Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah lebih memfokuskan pada aspek normatif yang membuat Jerman mengerluarkan kebijakan pintu terbuka terhadap pengungsi.

* 1. **Kerangka Konseptual**

Dengan tujuan dasarmya untuk menjelaskan permasalahan dan mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam, penulis mengutip konsep-konsep ilmiah yang berkolerasi dengan tema, judul, dan masalah untuk memberikan landasan pemikiran agar diakui keabsahannya. Sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami secara akurat dengan metode dan konsep dalam penyusunan penelitian ini.

Kerangka pemikiran sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian dimana terdapat kumpulan konsep, pandangan para pakar, dan sumber ilmiah lain yang tentunya memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan penulisan secara sistematis sehingga menciptakan formasi pengetahuan yang komprehensif. Penulis menggunakan beberapa konsep yang menyokong penelitian ini, diantaranya; hubungan internasional, kebijakan luar negeri, pengungsi, islamophobia, gerakan sosial (*social movement)*, identitas nasional, dan keamanan manusia.

Studi hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara aktor-aktor di dunia. Aktor dari interaksi ini menurut pendekatan realisme hanya negara (*state*), sama dengan Alexander Wendt yang merupakan salah satu tokoh konstruktivis mempertahankan asumsi negara sebagai aktor dalam hubungan internasional.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi hubungan internasional menurut K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis yaitu sebagai berikut:

**Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Hubungan internasional mencangkup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara sebagai negara didunia.**[[5]](#footnote-6)

Studi hubungan internasional salah satunya mencakup politik luar negeri. Menurut Rosenau, dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan sebagai oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.[[6]](#footnote-7)

Politik luar negeri erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri yang merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[[7]](#footnote-8)

Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen sebagai berikut:

**Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai sekumpulan pilihan yang diputuskan oleh individu, kelompok atau koalisi dan akan mempengaruhi tindakan negaranya dalam lingkungan internasional. Dalam kebijakan luar negeri terdapat seperangkat karakter yang lekat dengan pembuatan keputusan, yakni ketidakpastian dan resiko.[[8]](#footnote-9)**

Kebijakan luar negeri merupakan unsur penting dalam membentuk sebuah fenomena internasional, sebab kebijakan yang diterapkan suatu negara akan menciptakan sebuah interaksi.[[9]](#footnote-10) Kebijakan luar negeri sebagai bentuk interaksi yang terjadi antar negara karena didalamnya terdapat sebuah tindakan dan juga respon dari tindakan tersebut. Dengan demikian, penting untuk memahami kebijakan luar negeri dari level negara. Level ini mencakup faktor internal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara. Faktor-faktor internal dapat dilihat dari kerangka institusi serta kondisi negara (seperti dalam hal ekonomi, sejarah, dan kebudayaan negara). Kebijakan luar negeri dibuat melalui beberapa fokus dengan mengenali permasalahan, membingkai isu, mengumpulkan persepsi, memprioritaskan tujuan, serta mengumpulkan pilihan-pilihan yang didasarkan pada masalah yang ada saat ini.[[10]](#footnote-11)

Masalah kontemporer yang mendapat perhatian dunia internasional salah satunya yaitu pengungsi. Jadi, kebijakan suatu negara dalam menyikapi krisis pengungsi yang masuk ke negaranya ini menjadi tolak ukur bagaimana suatu kebijakan akan menimbulkan interaksi di ranah internasional termasuk kebijakan pintu terbuka yang diusulkan oleh Jerman dalam menanggapi permasalahan pengungsi yang ada.

Kemudian konsep mengenai pengungsi, dimana sangat penting mengetahui definisi pengungsi untuk menganalisa yang mana dan bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai status pengungsi tahun 1951 mendefinisikan:

**Pengungsi adalah orang yang berada di luar tempat tinggal atau negara asalnya. Hal ini didasari oleh ketakutan akan diganggu keselamatannya yang dialami akibat faktor kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya dan orang tersebut tidak dapat ataupun tidak mau untuk kembali ke negara asalnya.[[11]](#footnote-12)**

Akan tetapi seringkali definisi mengenai pengungsi dikaitkan dengan pencari suaka (*asylum seeker).* Menurut Ahmad Roman (2003), pengungsi merupakan sebuah tahap dari proses untuk mencari suaka di negara lain. Seorang pengungsi merupakan sebuah pencari suaka, namun pencari suaka belum tentu adalah seorang pengungsi. Para pengungsi adalah orang-orang yang tidak dapat mencari penghidupan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan perlindungan dari negara dimana mereka berada. Kepergian mereka juga karena terpaksa, akibatnya mereka tidak dapat mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas negara mereka untuk pergi mengungsi ke negara lain.[[12]](#footnote-13)

Pengungsi juga diartikan sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun dinegara mereka mengungsi. Kepergian mereka ke tempat atau negara lain bukan atas dasar keinginan diri pribadi tetapi karena terpaksa serta tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu, sehingga timbulah pelanggaran terhadap hak asasi pengungsi yang tidak dapat dihindari. Dalam kaitan dengan pengungsi terdapat dua jenis pengungsi yaitu:[[13]](#footnote-14)

1. Pengungsi internal berdasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal (*Guilding Principles on Internal Displacement*) ialah orang-orang atau kelompok yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka dahulu biasa tinggal terutama sebagai akibat atau dalam rangka menghindari diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia dan yang tidak melintasi perbatasan negara diakui secara internasional.
2. Pengungsi Lintas Batas yang berdasarkan pada Konvensi 1951 adalah sebagai hasil dari peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan karena ketakutan yang terbentuk akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena takut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara bekas tempat tinggalnya sebagai akibat dari peristiwa tersebut, tidak dapat atau karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke sana.

Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yakni[[14]](#footnote-15):

1. Pengungsian karena bencana alam (*natural disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat meminta pertolongan pada negara darimana ia berasal.
2. Pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (*man made disaster*). Pengungsi disini pada prinsipnya keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

Melonjaknya krisis pengungsi yang melintasi batas negara dan memasuki negara Jerman telah menjadi sorotan di dalam negeri baik dari elit politik maupun masyarakatnya sendiri. Pengungsi yang berasal dari Timur Tengah khususnya Suriah dengan mayoritas beragama islam menimbukan pandangan yang kurang diterima untuk masuk ke Jerman ditengah sentimen islamophobia.

De Clerq (1994) menganggap phobia sebagai bentuk khusus ketakutan. Kecemasan dalam phobia dialami apabila seseorang menghadapi objek atau situasi yang ditakuti atau dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Sebagai tanggapannya, orang menunjukkan tingkah laku penghindaran yang merupakan ciri utama semua phobia.[[15]](#footnote-16) Sedangkan definisi islamophobia yaitu:

**“Islamophobia ialah ketakutan yang berlebihan terhadap hal-hal berbau islam, islamophobia ini muncul karena didorong oleh keberadaan situasi politik dan sejarah. Islamophobia ini bukan merupakan permasalahan baru dalam hubungan islam dan barat.”[[16]](#footnote-17)**

Sekelompok ahli hubungan antar ras atau suku bangsa di Inggris mulai membentuk sebuah komisi khusus dan mempelajari serta menganalisis islamophobia mulai tahun 1995. Komisi yang meneliti tentang muslim di Inggris dan islamophobia melaporkan bahwa islam dipersepsikan sebagai sebuah ancaman, baik di dunia maupun secara khusus di Inggris. Islam disebut sebagai pengganti kekuatan Nazi maupun komunis yang mengandung gambaran tentang invasi dan infiltrasi. Hal ini mengacu pada ketakutan dan kebencian terhadap islam dan berlanjut pada ketakutan serta rasa tidak suka kepada sebagian besar orang-orang islam. Kebencian dan rasa tidak suka ini berlangsung di beberapa negara barat dan sebagian budaya di beberapa negara. Dua puluh tahun terakhir ini rasa tidak suka tersebut makin ditampakkan, lebih ekstrim dan lebih berbahaya.[[17]](#footnote-18)

Istilah islamophobia muncul karena ada fenomena baru yang membutuhkan penamaan. Prasangka anti muslim berkembang begitu cepat pada beberapa tahun terakhir ini sehingga membutuhkan kosakata baru untuk mengidentifikasikan. Penggunaan istilah baru yaitu islamophobia tidak akanmenimbulkan konflik namun dipercaya akan lebih memainkan peranan dalam usaha untuk mengoreksi persepsi dan membangun hubungan yang lebih baik.[[18]](#footnote-19) Islamophobia tidak dapat dipisahkan dari problema prasangka terhadap orang muslim dan orang yang dipersepsi sebagai muslim. Prasangka anti muslim didasarkan pada sebuah klaim bahwa islam adalah agama “inferior” dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai yang dominan pada sebuah masyarakat.[[19]](#footnote-20)

Pada penelitian ini, penulis melihat dari pendekatan konstruktivisme bahwa islamophobia merupakan hasil konstruksi sosial yang dihasilkan oleh agen sosial (individu). Penulis memahami bahwa islamophobia tidak akan bisa didapat jika tidak ada individu yang saling berinteraksi. Individu inilah yang mampu menghasilkan kehidupan sosial dan disanalah perubahan tersebut terjadi.[[20]](#footnote-21)

Dalam kasus di Eropa termasuk Jerman, islamophobia banyak dialasankan sebagai kritik dan juga bantahan terhadap muslim dan nilai-nilai islam. Dalam dunia demokrasi liberal, hal itu merupakan sebuah kritik yang sah dan memiliki legitimasi terhadap entitas yang lain. Untuk dapat mengenali antara kritik yang sah, bantahan dan juga islamophobia atau ketakutan terhadap Islam. Islamophobia memiliki beberapa karakteristik, laporan Runnymede menjelaskan sebuah kunci untuk memahami perbedaan tersebut, yaitu pandangan yang terbuka dan pandangan yang tertutup terhadap Islam *(open and closed views of Islam*). Phobia dan ketakutan terhadap islam yang terjadi merupakan karakteristik dari pandangan yang tertutup terhadap Islam *(closed views).* Tidak ada pembenaran yang logis di dalamnya, yang ada hanyalah prasangka-prasangka yang terlahir akibat persepsi-persepsi buruk yang terus menerus ditanamkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan, kebencian, egois, tidak toleran dan membatasi pemeluknya dengan aturan-aturan yang ketat sehingga tidak adanya kebebasan di dalamnya yang berujung persepsi bahwa Islam adalah kuno, ekstrim, agama yang membawa kehancuran, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya anggapan tentang Islam adalah agama yang diskriminatif sama sekali tidak di benarkan. Sementara ketidaksetujuan yang logis dan kritik serta apresiasi maupun pernghormatan merupakan pandangan yang terbuka terhadap Islam (*open views*).[[21]](#footnote-22)

Sejarahnya pada tahun 1941-1942, ketika tentara Jerman memasuki wilayah berpenduduk muslim di Balkan, Afrika Utara, Krimea, dan Kaukasus dan mendekati Timur Tengah dan Asia Tengah, Berlin mulai melihat Islam sebagai faktor signifikan secara politis. Nazi Jerman melakukan upaya besar untuk mempromosikan "aliansi dengan dunia muslim" guna melawan pihak yang mereka anggap sebagai musuh seperti Kerajaan Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat dan kaum Yahudi. Di zona perang, Jerman melakukan berbagai macam kebijakan keagamaan dan propaganda untuk mempromosikan rezim Nazi kepada para pemimpin islam. Mereka ingin tentaranya berperilaku baik terhadap populasi muslim. Dan Nazi memerintahkan pembangunan kembali masjid, mushola dan madrasah yang sebelumnya dihancurkan oleh Uni Soviet. Seharusnya Islam menjadi agama panutan, karena sejarah mengatakan islam berjasa membantu pembangunan Jerman setelah Perang Dunia. Namun munculnya pandangan neo-Nazi yang membawa dampak buruk pada pemahaman tentang Islam, padahal Nazi tidak pernah mengganggap Islam sebagai target. Misi dari neo-Nazi kembali yaitu menghidupkan kembali semangat *‘nationalsozialismus’* (Nazi) bentukan Adolf Hitler dengan sasaran baru anti pengungsi dan umat Muslim, yang selama ini dianggap telah menginfiltrasi dan merusak budaya Jerman.[[22]](#footnote-23)

Dewasa ini, islamophobia muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan menengah keatas. Mulai dari mereka yang mencela maupun yang mengkritik islam. Islamophobia ditunjukkan dari setiap kalangan dan mendukung kebencian tersebut dengan mengatasnamakan pembenaran dalam pemahaman ideologi mereka. Dalam memahami atau menjelaskan fenomena yang telah memiliki dampak yang dramatis dalam ruang yang relatif singkat dan melibatkan banyak orang, yang paling banyak bertanggung jawab atas hal ini adalah media. Media yang merupakan alat informasi ke setiap tempat maupun kalangan, membuat banyak orang yang phobia terhadap islam karena informasi yang diterima tidak dinyatakan dengan benar, kebanyakan didalamnya mengandung unsur propaganda dan menyusulnya pasca tragedi WTC (*World Trade Center)* pada 11 September 2001 yang mempertegas ketakutan mereka. Kurangnya informasi tentang kebenaran islam yang diterima dan yang diinformasikan oleh banyak orang terutama media mengakibatkan kesimpangsiuran tentang kebenaran Islam.[[23]](#footnote-24) Dan didalam Al-Quran juga diajarkan untuk menyayangi sesama mahluk hidup di dunia, jadi islam tidak seburuk dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang berprasangka buruk terhadap islam pada umumnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kesabaran pada umatnya serta mau memaafkan kesalahan.

Dalam konteks ini, di Jerman sendiri muncul gerakan sosial anti-islam yang dinamakan Pegida yang bertujuan menolak islamisasi di dunia barat. Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Anthony Giddens menyatakan bahwa:

**“Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar sesuatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.”[[24]](#footnote-25)**

Pengertian yang nyaris persis diutarakan oleh Sidney Tarrow yang menyatakan:

**Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya.Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.Gerakan sosial bisa beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara ilegal atau sebagai kelompok ‘bawah tanah’ (*underground groups*).[[25]](#footnote-26)**

Munculnya gerakan sosial Pegida di Jerman ini menjadi salah satu bentuk untuk menolak islamisasi dan perhentian penerimaan pengungsi yang datang ke Jerman. Eksistensi Pegida dalam menjalankan aksinya juga didukung oleh Konstitusi nasional Jerman yang memiliki regulasi untuk mengatur kelompok sosial yang berkembang dalam masyarakat yaitu Partai AfD (Alternatif untuk Jerman).[[26]](#footnote-27) Partai AfD maupun Pegida memiliki kesamaan ideologi dan fokus perhatian pada penolakan terhadap islamisasi di Jerman. Jika proses islamisasi dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi krisis identitas nasional dan tradisi sebagai orang Jerman.

Identitas menurut [Gardiner W. Harry](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gardiner_W._Harry&action=edit&redlink=1) dan [Kosmitzki Corinne](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosmitzki_Corinne&action=edit&redlink=1) sebagai:

**“Pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap.Sedangkan,identitas nasional merujuk pada kebangsaan seseorang”.[[27]](#footnote-28)**

Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara di mana mereka dilahirkan. Akan tetapi, identitas nasional dapat juga diperoleh melalui imigrasi, pengungsi dan naturalisasi. Orang yang identitas nasionalnya berbeda dari tempat ia dilahirkan pada akhirnya akan mulai mengadopsi aspek identitas nasional yang baru. Namun, hal ini tergantung pada keterikatan dengan negara yang baru tersebut. Sementara itu, orang yang secara permanen tinggal di negara lain mungkin akan mempertahankan identitas negara tempat ia lahir.[[28]](#footnote-29)

Gerakan sosial Pegida berpandangan bahwa setiap pendatang (pengungsi) memiliki identitas nasional yang dimiliki sejak lahir (*natural identity*). Kewarganegaraan tersebut seharusnya digunakan sebagai sebuah identitas untuk hidup dalam suatu komunitas yang sama di mana dia dilahirkan. Tuntutan mengenai status kewarganegaraan kepada pendatang agar mereka hidup dalam komunitas yang sesuai dengan kebangsaan mereka dan bukan menjadi bagian dari arus pengungsi ke Jerman. Perspektif Pegida bersumber dari kebudayaan yang secara umum menjadi kebiasaan masyarakat Jerman, yaitu kebudayaan Barat (Jerman: *Abendland*) yang tidak hanya berdasarkan tradisi, namun juga diakui oleh komunitas politis. Nilai-nilai *abendland* yang dimaksud merujuk pada nilai Yahudi-Kristen yang memiliki konsep bebas konten dan fleksibel menunjukkan berbagai macam perspektif ideologis dalam sejarah mereka. Dan menyatakan bahwa ideologi *abendland* juga menentang islam dan menciptakan persepsi bahwa islam adalah musuh bersama.[[29]](#footnote-30)

Perspektif konstruktivis menjelaskan mengenai identitas, nilai dan norma, serta bahasa sebagai konsep utama.[[30]](#footnote-31) Pertama, kesamaan identitas sebagai orang Jerman antar anggota Pegida menjadi modal utama untuk bergabung dan berpartisipasi dalam pergerakan Pegida. Dari kesamaan identitas sebagai orang Jerman tersebut memunculkan sikap dan perasaan senasib dan sepenanggungan atas gelombang pengungsi yang mengancam kelangsungan hidup warga Jerman. Kedua, konsepsi nilai dan norma yang telah disepakati bersama berbeda, sehingga menyebabkan fraksi atau gesekan antara masyarakat Jerman dengan para pengungsi yang bersifat lintas budaya khususnya dari segi agama. Banyaknya jumlah pengungsi yang datang ke Jerman dikhawatirkan dapat mengikis nilai dan norma setempat, khususnya tradisi Kristen-Yahudi. Ketiga, bahasa mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan konstruksi sosial. Dalam menjalankan aksinya, kelompok Pegida selalu menggunakan kata-kata dan kalimat yang menunjukkan posisi kelompok Pegida di Jerman dan siapa yang menjadi lawan mereka. Hubungan antar masyarakat sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai.Sementara itu nilai terbentuk karena adanya prinsip-prinsip dasar untuk hidup bersama, membentuk ‘kita’ bertindak sebagai sebuah komunitas. Nilai diyakini mampu menjamin pembagian atas kepentingan-kepentingan bersama dengan menyatukan seluruh masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dan mendapatkan apa yang menjadi haknya secara adil. Sehingga, eksistensi islam dianggap akan mengancam kehidupan seluruh entitas masyarakat di Jerman.[[31]](#footnote-32)

Aktivitas Pegida dapat berubah menjadi negatif jika gerakan tersebut dimobilisasi untuk merespon perubahan yang dinilai buruk sehingga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Melonjaknya krisis pengungsi menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial, khususnya mengenai tindakan kejahatan yang ditujukan kepada para pengungsi ditengah maraknya sentimen islamophobia di Jerman. Dengan begitu, eksistensi Pegida ini bisa mengancam keamanan bagi para pengungsi yang datang.

Dimensi keamanan yang pada mulanya berfokus kepada keamanan negara, mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif non-tradisional yang lebih mengedepankan keamanan manusia (*human security*). Oleh karena itu, keamanan tidak lagi berfokus pada *interstate relations* tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat.[[32]](#footnote-33) Pergeseran isu keamanan pasca Perang Dingin yang pada awalnya fokus terhadap keamanan negara berubah menjadi keamanan manusia (*human security)* merupakan sebuah reaksi terhadap masalah-masalah dunia yang dihadapi saat ini.Seperti perdagangan manusia, terrorisme, dan permasalahan pengungsi akibat konflik kekerasan fisik, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya.[[33]](#footnote-34)

UNDP mendefinisikan keamanan manusia *(human security)* memiliki dua aspek utama, yakni:

**Pertama, keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Dan kedua, ini berarti perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari - baik di rumah, pekerjaan atau di masyarakat.Ancaman semacam itu bisa ada di semua tingkat pendapatan nasional dan pembangunan”.**[[34]](#footnote-35)

Dalam publikasi UNDP terdapat tujuh komponen utama dalam keamanan manusia *(human security)* yaitu: keamanan ekonomi *(economic security),* keamanan pangan *(food security),* keamanan kesehatan *(health security),* keamanan lingkungan *(environmental security),* keamanan individu *(personal security),* keamanan masyarakat *(community security),*dan keamanan politik *(political security).*[[35]](#footnote-36)Dari ketujuh komponen tersebut penelitian ini menggunakan dua komponen, yaitu keamanan individu dan keamanan masyarakat. Hal ini terkait dengan permasalahan pengungsi ditengah maraknya sentimen islamophobia di Jerman yang menjadikan adanya diskriminasi dan kesenjangan antara pengungsi dan masyarakat.

1. Keamanan individu (*personal security)*

Keamanan individu bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik baik dari aparatur negara, negara lain, sesama individu hingga pelecehan. Bagi banyak orang, sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan fisik.[[36]](#footnote-37) Berkaitan dengan keamanan individu *(personal security),* menurut Shahrbanou Tadjbakhshbahwa keamanan individu adalah mereka yang dikaitkan dengan ancaman kriminalitas, persepsi individu dan ketakutan; seperti, takut kehilangan akses ke layanan kesehatan dalam proses reformasi asuransi kesehatan, atau takut kehilangan pekerjaan.[[37]](#footnote-38) Begitupula mencakup ancaman dari negara melalui penyiksaan fisik, ancaman dari negara-negara lain (perang), dari terorisme internasional maupun antar negara, dan individu atau geng (kekerasan jalanan), dan lain sebagainya.Oleh karena itu, dimensi ini umumnya dikaitkan dengan kebebasan dari rasa takut.[[38]](#footnote-39)

1. Keamanan komunitas (*community security)*

Keanekaragaman budaya yang membentuk sebuah komunitas/masyarakat memerlukan keamanan dari ancaman yang menindas, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok etnis atau adat dan pengungsi.[[39]](#footnote-40) Sebagaimana dijelaskan dalam laporan UNDP 1994 bahwa keamanan komunitas bertujuan melindungi orang dari hilangnya hubungan dan nilai tradisional, serta dari kekerasan sektarian, religi dan etnis. Komunitas tradisional, terutama kelompok etnis dan kepercayaan minoritas sering kali merasa terancam. Sekitar setengah dari seluruh jumlah negara di dunia pernah mengalami ketegangan antar etnis.[[40]](#footnote-41)

Sedangkan, pada paradigma konstruktivis oleh Alexander Wendt mengkategorikan keamanan manusia· ke dalam lima jenis:[[41]](#footnote-42)

* Keamanan fisik: manusia membutuhkan makanan,minuman, tidur, dan perlindungan dari ancaman fisik, termasuk kematian,
* Keamanan ontologis: manusia membutuhkan ekspektasi yang relatif stabil tentang dunia sosial dan alam di sekitar mereka, dalam artian pengakuan eksistensi oleh masyarakat,
* Sosiasi: bentuk keamanan ketigaadalah bagaimana manusia mendapatkan cinta· dan berinteraksi sosial dengan satu sama lain,
* *Self-esteem*: pada level ini, manusia ingin merasa puas tentang diri mereka sendiri, dan biasanyadicapai melalui prestasi ataupun kekuasaan,
* Transendensi: manusia membutuhkan inspirasi atau sumber kreativitas untuk selalu meningkatkan kondisi hidupnya.

Dari penjelasan konsep keamanan manusia *(human security)* diatas, maka permasalahan pengungsi ditengah maraknya sentimen islamophobia dan adanya eksistensi gerakan Pegida tersebut bisa mengganggu keamanan individu dan keamanan komunitas dari pengungsi sendiri yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor dari perbedaan yang ada.

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual dan perumusan masalah serta asumsi-asumsi diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Islamophobia yang ada di Jerman telah membentuk gerakan sosial (Pegida) yang dianggap akan mengancam identitas nasional dan lunturnya tradisi Jerman (Yahudi-Kristen). Dengan begitu, semakin besar eksistensi dan upaya Pegida dalam menolak islamisasi menjadikan semakin besar ancaman keamanan bagi para pengungsi di Jerman”.**

* 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

**Tabel 1. Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabael dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel bebas:  Islamophobia di Jerman | 1. Faktor agama  2. Adanya gerakan kelompok anti-islam  3. Adanya teror yang ditujukan ke beberapa negara Eropa | 1. Islamophobia muncul karena adanya perbedaan perspektif terhadap agama Islam. Seseorang yang mengalami islamophobia memandang islam sebagai agama yang anarkis, agama teroris, agama yang tidak bisa berbaur dengan kehidupan yang modern. Islamophobia pada tahun 2015 yang disebut sebagai 'krisis pengungsi' telah memiliki efek merusak dari penggabungan sentimen anti-pengungsi, islamophobia dan nasionalisme patriotik. Mereka yang anti-Islam menyatakan bahwa ketentuan dan syariah Islam yang tidak sama dengan aturan, nilai dan kebudayaan Barat (Yahudi-Kristen). (Bayrakli Enes and Hafez Farid, European Islamophobia Report, (Istanbul: SETA, 2016), hlm.185)  2. Kelompok anti-islam yang dinamakan Pegida ini merupakan salah satu dampak dari islamophobia yang menolak islamisasi di Jerman. Jika proses islamisasi dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi krisis identitas dan tradisi sebagai orang Jerman(Yahudi-Kristen). Eksistensi kelompok Pegida tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi awal kemunculannya seperti faktor sejarah, faktor pemimpin, faktor terjadinya krisis pengungsi dan proses islamisasi, serta faktor-faktor lain yang kemungkinan mendukung dari keberadaan kelompok Pegida. (<http://www.dw.com/id/mencermati-naiknya-popularitas-gerakan-anti-islam/a-18147950>)  3. Islamophobia sudah menjangkiti sebagian masyarakat Eropa seperti Jerman, pada 2015 pasca aksi teror Paris serta tahun 2016 dengan adanya teror di sebuah pasar Natal di Berlin yang menyebabkan tewasnya 12 orang dan melukai 48 lainnya ini sepertinya akan menjadi bensin yang menambah semakin besarnya api kebencian. Masyarakat umum yang tidak begitu mengenal ajaran islam dan jika melihat ada pelaku teror yang mengatasnamakan agama ini, maka islam pun akan diidentikkan dengan ajaran kekerasan dan pembunuhan. ([https://www.kompasiana.com/lovelydarsem/dampak-teror-paris-bagi-muslim-di-negara-minoritas564adeee3393738 c12d060aa](https://www.kompasiana.com/lovelydarsem/dampak-teror-paris-bagi-muslim-di-negara-minoritas564adeee3393738%20c12d060aa)) |
| Variable terikat:  Pengungsi Suriah di Jerman | 1. Perang sipil di Suriah  2. Kebijakan pintu terbuka Jerman  3. Keamanan pengungsi Suriah di Jerman | 1. Perang yang terjadi di Suriah sejak 2011 itu telah memakan banyak korban yang kebanyakan adalah warga sipil. Menurut [Syrian Center for Policy Research](https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflict-finds-115-of-population-killed-or-injured) pada Februari 2016, jumlah korban tewas di Suriah akibat perang mencapai 470.000. Kini sebagian rakyat Suriah mengungsi dan mencari perlindungan ke negara-negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. (<http://www.dw.com/id/anak-anak-jadi-korban-utama-perang-di-suriah/a-18313583>)  2. Saat ini Jerman menjadi negara paling ramah dalam menerima pengungsi. Kebijakan pintu terbuka telah dipengaruhi oleh pandangannya dari sejarah Jerman. Kanselir Merkel sebagai sosok yang besar di Jerman Timur menyadari terjadinya gerakan pengungsian besar-besaran di seluruh Eropa pada masa setelah Jerman mengalami kekalahan Perang Dunia Dua atas nasib buruk yang dialami oleh pengungsi tersebut. Hal ini dapat menjadi dasar pembentukan kebijakan pintu terbuka yang masih diimplementasikan sampai sekarang termasuk dengan pengungsi Suriah.(<http://www.dw.com/id/tajuk-krisis-pengungsi-mengubah-jerman/a-19522847>)  3. Di tengah meningkatnya ketakutan-ketakutan akan ancaman teror di Eropa, kekhawatiran juga mendera kamp-kamp dan tempat ibadah para pengungsi Muslim di benua itu. Di Jerman, para pengungsi Suriah mengatakan mereka takut akan reaksi buruk jika mereka dipersalahkan atas kampanye mengerikan yang semakin meningkat dari para teroris. Sejak serangan-serangan di Paris, para pengungsi Suriah di Eropa terkadang ketakutan dan para politisi di seluruh dunia memperingatkan bahwa para teroris mungkin bersembunyi di antara para pengungsi. Ketakutan-ketakutan akan keamanan menyangkut para pengungsi juga membuat frustrasi, karena tinggal di Suriah bukanlah merupakan pilihan baginya. (https://www.voaindonesia. com/a/pengungsi-di-jerman-ketakutan-di-tengah-peningkatan-ancaman-teror/3069658.html) |

* 1. **Skema Kerangka Konseptual**

**Gambar 1. Alur Penelitian**

**JERMAN**

**SURIAH**

Kebijakan pintu terbuka yang diusulkan oleh Kanselir Merkel

Perang Sipil

Fenomena Pengungsi Internasional (*cross international border refugee*)

Melonjaknnya pengungsi Suriah yang masuk

Pengungsi ke Jerman

Maraknya isu dan sentimen Islamophobia

Adanya gerakan anti-islam dan pengungsi (Pegida)

Keamanan manusia (*human security)* para pengungsi

1. Marwan Mohammed, “Islamophobic Trends in Europe” IEMed Mediterranean Yearbook ,Paris, 2014, dalam <http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/anuari-2014/Marwan_Mohammed_islamophobia_Europe_IEMed_yearbook_2014_EN.pdf> pada tanggal 6 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-2)
2. M.Ridha Farlanda, “Analisis Penyebab Munculnya Islamophobia di Jerman”, Skripsi Hubungan Internasional, tidak diterbitkan, Universitas Syiah Kuala, 2016. [↑](#footnote-ref-3)
3. Arie Setya Ningrum, “Eksistensi Kelompok Pegida serta Propaganda Anti-Pencari Suaka dan Islamophobia di Jerman”, Journal of International Relations, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2016 dalam website <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/12876> pada tanggal 8 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-4)
4. Tasya Priva Avissa, “Kebijakan Jerman terhadap Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015-2016”, Jurnal Hubungan Internasional, dalam website [http://repository.umy.ac.id/bitstream/ handle/123456789/12289/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/%20handle/123456789/12289/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y) pada tanggal 8 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-5)
5. K.J. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Juwanda), (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid., hlm. 49. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
8. Alex Mintz and Karl DeRouen, Understanding Foreign Policy Decision Making, (Cambrige:Cambrige University Press, 2010) hlm.14 [↑](#footnote-ref-9)
9. Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, (USA, 2007), hlm 5. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid., hlm 12-13. [↑](#footnote-ref-11)
11. Richard W Mansbach and Kirsten L. Rafferty. Pengantar Politik Global, terj. Amat Asnawi, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012), hlm. 748 [↑](#footnote-ref-12)
12. Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan

    prinsip-prinsip perlindungan Internasional, (Jakarta , 2003), hlm.20. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sri Badimi Amidjoyo, Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi

    Jenewa 1951, (Jakarta), hlm.6. [↑](#footnote-ref-14)
14. Michael Walzer, Just and Unjust War: A Moral Argument with Historical Illustrations, (US: basic books, 1977) [↑](#footnote-ref-15)
15. De Clerq, Tingkah Laku Abnormal: Dari Sudut Pandang Perkembangan, (Jakarta: Grasindo, 1994) [↑](#footnote-ref-16)
16. Alwi Shihab, Membedah Islam di Barat Menepis Tudingan, Meluruskan Kesalahpahaman, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm.2-8 [↑](#footnote-ref-17)
17. Trust Runnymede. Islamophobia: A Challenge for us all, (London: Runnymede Trust, Commission on British Muslims and Islamopbobia. 1997) [↑](#footnote-ref-18)
18. Young European Muslims, “Islamophobia and The West. Young European Muslims” dalam<http://www.lancashiremosques.com/data/%20newsletter/issue5.pdf>diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdel-Hady, Z., International Conference On Muslim and Islam in 21st Century: Image and Reality, (Kualalumpur: International Islamic University of Malaysia. 2004) [↑](#footnote-ref-20)
20. Argyo Demartoto, Teori Konstruksi Sosial, dalam [http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/ teori-konstruksisosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/](http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/%20teori-konstruksisosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/) diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-21)
21. Trust Runnymede, Islamophobia: A Challenge for us all,(London: Runnymede Trust, Commission on British Muslims and Islamopbobia. 1997) [↑](#footnote-ref-22)
22. “Hitler dan Nazi”, dalam <http://www.dw.com/id/bagaimana-hitler-dan-nazi-menggunakan-isu-islam-untuk-politik-anti-yahudi/a-41425922> diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-23)
23. Nata, K. D, “Upaya anti silam di jerman menghadapi gerakan anti Islam”, dalam <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id> diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-24)
24. Fadhillah Putra dkk, Gerakan Sosial, Konsep, Strategi,Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia , (Malang : PlaCID’s dan Averroes Press,2006), Hlm.1.  [↑](#footnote-ref-25)
25. Andik Matulessy, Mahasiswa dan Gerakan Sosial (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm 40 [↑](#footnote-ref-26)
26. Deutscher Bundestag. Basic Law for The Federal Republic of Germany,(German Bundestag. Germany. 2012) [↑](#footnote-ref-27)
27. Identitas, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas> diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-28)
28. “Identitas”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas>diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-29)
29. Prof. Dr. Malte Thran and Lukas Boehnke, “The value-based Nationalism of Pegida”, Journal for Deradicalization, Number 3 Tahun 2015 dalam [http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/ article/view/21](http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/%20article/view/21) diakses pada 9Maret 2018 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ian Hurd, Constructivism: The Oxford Handbook of International Relations, (Oxford University Press: New York, 2008,) hlm. 299 [↑](#footnote-ref-31)
31. Boehnke, P. D, “The value-based Nationalism of Pegida”, ( Journal for Deradicalization, 2015), hlm.180. [↑](#footnote-ref-32)
32. Simon Dalby, Environment Dimension of Human Security, in Environment Security: Approach and Issues, edited by Rita Floyd and Richard Mattew, hlm 102-103 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid. [↑](#footnote-ref-34)
34. United Nations Development Programme , Human Development Report 1994 , dalam <http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf> hlm.23. diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid., hlm 24-25. [↑](#footnote-ref-36)
36. Ibid.,hlm 30. [↑](#footnote-ref-37)
37. Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, Human Security: Concepts and implications, (London: Routledge, 2007), hlm 14 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid.,hlm 15. [↑](#footnote-ref-40)
40. UNDP, Human Development Report 1994 , dalam [http://hdr.undp.org/sites/default/files /reports/255/hdr\_1994\_en\_complete\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files%20/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf) , hlm.31. diakses pada 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-41)
41. Alexander Wendt, Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics in International Organization, hlm. 105-107 [↑](#footnote-ref-42)